



Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Dampaknya terhadap Koordinasi UPTD dalam Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa dan Efektivitas Pembangunan Desa

Nanang Rohman

Kasubag Keuangan Kecamatan Samarang, Garut

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Implementasi kebijakan pembangunan desa dan Koordinasi UPTD dalam rangka peningkatan Kinerja pemerintahan desa dan efektivitas pembangunan desa di Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 107 orang kepala desa di Kabupaten Garut. Agar hasil penelitian lebih akurat, maka untuk populasi kepala desa dilakukan penarikan sample penelitian. Adapun teknik penarikan sampling yang digunakan adalah probability sampling. Untuk menentukan besarnya ukuran sample, maka digunakan rumus Yamane, sehingga diperoleh jumlah sample sebanyak 52 orang. Teknik pengumpulan data terdiri dari data primer berupa angket dan studi lapangan serta data sekunder berupa studi dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian adalah analisis statistic dengan model analisis jalur (path analysis).

Hasil pengujian hipotesis utama diketahui bahwa implementasi kebijakan pembangunan desa berpengaruh terhadap koordinasi UPTD dalam upaya meningkatkan Kinerja pemerintahan desa dan efektivitas pembangunan desa. Sementara hasil pengujian sub hipotesis pengaruh implementasi kebijakan pembangunan desa secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap koordinasi UPTD, sedangkan pengaruh diluar variable implementasi kebijakan pembangunan desa. Sedangkan implementasi kebijakan pembangunan desa secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintahan desa dan efektivitas pembangunan desa.

Kata kunci : Koordinasi; Kinerja Pemerintah; Efektifitas Pembangunan;

1 Pendahuluan

Pemerintahan yang baik (*good governance*) bukan saja memerlukan suatu kebijakan yang baik (*good policy*) tapi juga memerlukan sesuatu sistem dan proses pelaksanaan kebijakan yang baik pula (*good policy implementation system and process*). Sistem dan proses implementasi dari suatu kebijakan itulah yang dikenal dengan manajemen kebijakan publik, (Mustopadidjaja, 2003). Manajemen kebijakan publik merupakan fenomena yang kompleks dan dinamis yang dapat dikaji dari berbagai disiplin ilmu (Mustopadidjaja, 2003). Kompleksitas dan dinamika tersebut akan lebih terasa apabila pengamatan kita dihubungkan dengan kebijakan publik. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan esensi dari keberadaan negara, sehingga dengan demikian kebijakan publik merupakan persentuhan negara dengan rakyatnya (Putra, 2003).

Proses kebijakan publik tidak semata-mata kegiatan teknis-teknokratis (Mustopadidjaja, 2003), tapi juga merupakan kegiatan sosio-politis yang sangat dinamik dan berlangsung dalam sistem kelembagaan yang kompleks. Kesemuanya ini berlangsung dalam lingkungan sosial politik dan kelembagaan dengan unsur-unsurnya yang kompleks, subjek dan objeknya yang berbeda-beda, latar belakang yang bervariasi, dan dengan kepentingan serta motif yang majemuk.

Suatu kebijakan publik yang telah dibuat oleh pemerintah tidak mempunyai arti bila tidak dapat dioperasionalkan atau tidak dapat mencapai sasarannya "banyak kebijakan publik yang kolaps di tengah jalan dan salah satu penyebabnya adalah kelembagaan", (Nugroho, 2003). Jadi dengan kata lain bahwa keberhasilan suatu kebijakan akan sangat tergantung sejauhmana kualitas praktek manajemen profesional di dalam lembaga-lembaga pemerintah sebagai eksekutor dari kebijakan publik. Kenyataan ini perlu dicermati karena kebijakan publik pada dasarnya "mengandung sifat" praktis dan pragmatis, karena itu perencanaan dari suatu kegiatan harus bersifat *feasible*, *implementable*, dan *sustainable* (Nugroho, 2003).

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan secara keseluruhan, oleh karenanya pembangunan desa pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat desa yang lebih baik, sehingga pembangunan desa menempati posisi yang strategis dalam pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa hal yang perlu diperhatikan adalah koordinasi, secara konseptual koordinasi merupakan salah satu fungsi pokok manajemen pemerintahan, keberhasilan pengelolaan pembangunan desa salah satunya sangat ditentukan oleh faktor koordinasi. Koordinasi merupakan jawaban terhadap kebutuhan desentralisasi, dalam perkembangan masyarakat dan upaya pembangunan yang semakin kompleks pengendalian yang serba terpusat sudah tidak dimungkinkan lagi untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka diperlukan koordinasi sebagai alternatif terhadap sentralisasi, koordinasi merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan merupakan tugas manajemen pembangunan untuk menjamin bahwa segala usaha pembangunan berjalan ke arah yang sesuai menuju kepada pencapaian sasaran (Iskandar, 2005/a).

Menurut Kartasmita (1997) " Koordinasi merupakan upaya untuk menghasilkan pembangunan yang efisien dalam pemanfaatan sumberdaya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran secara optimal'. Kinerja di sini adalah pengawasan, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja / hasil kerja / penampilan kerja yang diterjemahkan dari performance (kinerja). Maka kinerja mengandung pengertian suatu hasil akan dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang diperlukan.

Kondisi yang terjadi saat ini yaitu pelaksanaan kebijakan pembangunan desa di Kabupaten Garut belum efektif, hal ini disebabkan belum terbitnya aturan tentang pelaksanaan pembangunan desa yang memadai sebagai petunjuk operasional bagi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan desa, sehingga pertumbuhan pembangunan desa di Kabupaten Garut tidak berkembang secara pesat dan akibatnya terjadi ketimpangan.

2 Kajian Teori

Iskandar (2005/e) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut-paut dengan mechanism penjabaran keputusan-keputusan politik dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan juga

menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu Wahab (1997) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edwards. Edwards (dalam Iskandar, 2005/e) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila terdapat 4 (empat) faktor kritis yang mendukung, meliputi: a) dimensi komunikasi, b) dimensi sumber daya, c) dimensi disposisi atau sikap, dan d) dimensi struktur birokrasi. Komunikasi menunjukkan peranan penting sebagai acuan agar pelaksanaan kebijakan mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan, sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten.

Untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi perlu adanya suatu kerjasama yang ahli di bidang tertentu atau perlu adanya penggerakan dari suatu pemimpin, karena itu orang yang menggerakan atau mengkoordinasikan unsur-unsur di bawahnya agar supaya mencapai apa yang menjadi tujuan manajemen. Seorang koordinator adalah seberapa jauh mereka dapat menggerakan serta mengkoordinasikan orang-orang, alat-alat, bahan-bahan, uang, metode, mesin-mesin serta lainnya guna mencapai tujuan yang dikehendaki.

Koordinasi dapat terlaksana dengan baik jika semua unit bekerjasama secara sinergis dan memahami satu sama lain, untuk dapat melaksanakan suatu bentuk koordinasi hendaknya selalu memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi seperti dikemukakan oleh Pamudji (2002) yakni koordinasi harus dimulai dari tahap permulaan, koordinasi adalah proses yang kontinu, sepanjang kemungkinan koordinasi itu harus merupakan pertemuan bersama dan perbedaan-perbedaan dalam pandangan harus dikemukakan secara terbuka dan diselidiki dalam hubungannya dengan situasi seluruhnya.

Dalam penelitian ini, untuk menganalisa koordinasi antar UPTD, penulis menggunakan teori dari Iskandar. Iskandar (2005/d) menjelaskan bahwa koordinasi memiliki beberapa dimensi antara lain: a) dimensi unit-unit atau organisasi, b) dimensi sumber-sumber (potensi), c) dimensi kesatupaduan, d) dimensi gerak kegiatan, e) dimensi keserasian, f) dimensi arah (sasaran) yang sama.

Kinerja berasal dari kata *performance*, yang sering pula diartikan sebagai prestasi kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja. Manning and Curtis (1999), mengemukakan bahwa *performance is the result of natural ability, acquired skill, and the desire to achieve*. Jadi kinerja merupakan hasil dari kemampuan dasar, keterampilan yang diperoleh dan untuk mencapai keinginan.

Kemampuan personil adalah kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing personil sesuai dengan beban kerja dan tugasnya masing-masing. Pada operasionalisasi di lapangan, tidak setiap personil ditempatkan serta ditugaskan pada tempat yang tepat. Seringkali "*the right man on the right place*" tidak bisa ditemukan secara sempurna.

Fasilitas yang lengkap serta serba memudahkan tentu saja akan menjadikan kinerja menjadi lebih efisien dan efektif. Hal ini dikarenakan hamper delapan puluh persen fasilitas merupakan tuntutan dalam sebuah pelaksanaan kinerja. Demikian juga dengan sarana prasarana. Apabila sarana dan prasarana tersedia dengan sempurna, maka kinerja sebuah organisasi akan dengan mudah

dilakukan. Factor penunjang lainnya terkadang seperti sepele, namun apabila hal tersebut tidak ada biasanya menjadi sebuah hal yang cukup mengganggu.

Efektivitas pembangunan merupakan keputusan politik harus ditindak lanjuti dengan program-program yang lebih bersifat operasional, dalam hal ini dinas / instansi merupakan ujung tombak pemerintahan di daerah yang menggerakkan roda pembangunan desa perlu menyusun program sesuai dengan tugas. Menurut Abdurahmat (2003), mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya”.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori efektifitas dari Freemont E. Kas. Freemont E Kas dalam Sugiyono (2004: 23) menyatakan bahwa efektifitas itu dicirikan dengan dua dimensi yakni dimensi sejauh mana rencana dapat dilaksanakan dan dimensi sejauh mana tujuan tercapai.

3 Metode Penelitian

Beberapa variabel penelitian telah dirumuskan pada tingkat dimensi tentunya harus dapat dioperasionalkan dengan baik. Untuk kebutuhan analisis perlu diturunkan sampai tingkat indikator dari masing-masing variabel tersebut sehingga memudahkan pengukuran variabel-variabel pokok penelitian.

Alat ukur yang digunakan berupa kuesioner yang sudah tersusun secara terstruktur, yang memuat item-item pertanyaan berikut alternatif jawaban dengan cara memberikan tanda sesuai dengan petunjuk. Item pertanyaan dirancang berdasarkan tingkatan pengukuran variabel yang bersifat interval dan kategori jawaban terdiri dari lima tingkatan dengan menggunakan skala perbedaan *semantik*.

Populasi dalam penelitian ini adalah sejumlah kepala desa yang tersebar pada 11 Kecamatan yang memiliki kategori type A dan Type B di Kabupaten Garut. Kriteria kategorisasi tipologi kecamatan, jumlah populasi yang akan diteliti adalah sebanyak 107 kepala desa. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Cluster Random Sampling*.

4 Hasil dan Implikasi

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah “terdapat pengaruh Implementasi Pembangunan Desa terhadap Koordinasi UPTD dan Kinerja Pemerintah Desa dan Efektivitas Pembangunan Desa”. Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,309.

Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Implementasi Pembangunan Desa (X) berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel Koordinasi UPTD (Y) dan Kinerja Pemerintah Desa dan Efektivitas Pembangunan Desa (Z). Kecenderungan berpengaruhnya implementasi kebijakan pembangunan desa terhadap koordinasi UPTD, kinerja pemerintahan desa dan efektivitas pembangunan desa disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya ialah karena koordinasi ditentukan oleh factor teknis yang harus dipersiapkan seperti alokasi waktu, tempat dan biaya (Gibson dalam Iskandar, 2005/a).

Signifikansi nilai hasil pengujian di atas, didukung pula oleh besaran nilai Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,1281. Nilai ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa (X) berpengaruh terhadap Koordinasi UPTD (Y) dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa dan Efektivitas Pembangunan Desa (Z) sebesar 12,81 %. Secara teoretis kondisi ini didukung oleh pendapat Edward (dalam Iskandar, 2005), yang menyebutkan bahwa suatu implementasi merupakan ciri dari pola organisasi yang strukturnya dibuat sedemikian rupa sehingga secara maksimal dapat memanfaatkan tenaga ahli. Organisasi harus diatur secara rasional, impersonal, dan bebas dari sikap prasangka.

Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pengaruh variabel X terhadap Y, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($t_{0,975 ; 50}$) yaitu $t_{hitung} = -0,0300 < t_{tabel} = 2,0086$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 diterima, sehingga variabel Implementasi Pembangunan Desa (X) tidak berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel Koordinasi UPTD (Y). Dari hasil pengujian diketahui bahwa Implementasi Pembangunan Desa tidak memberikan pengaruh nyata terhadap Koordinasi UPTD.

Kecenderungan tidak berpengaruhnya implementasi pembangunan desa terhadap koordinasi UPTD dikarenakan koordinasi UPTD bersifat organisatoris sementara implementasi kebijakan bersifat praktis. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan desa bukanlah sebagai factor determinan penting yang dapat menentukan tingkat kualitas koordinasi UPTD. Salah satu faktor keberhasilan dalam koordinasi adalah komunikasi. Edwards (dalam Iskandar, 2005/e) menjelaskan bahwa komunikasi menunjukkan peranan penting sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Berarti komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten. Jadi, dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan pembangunan desa tidak termasuk ke dalam factor determinan yang mempengaruhi koordinasi UPTD.

Di sisi lain pengaruh variabel X terhadap Z_1 , maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($t_{0,975 ; 50}$) yaitu $t_{hitung} = 0,2732 < t_{tabel} = 2,0086$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Implementasi Pembangunan Desa (X) berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel Kinerja Pemerintah Desa (Z_1). Sehingga dari hasil pengujian diketahui bahwa Implementasi Pembangunan Desa tidak memberikan pengaruh nyata terhadap Kinerja Pemerintah Desa.

Sedangkan pengaruh variabel X terhadap Z_2 , maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{0,975 ; 50}$) yaitu $t_{hitung} = 0,2152 < t_{tabel} = 2,0086$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Implementasi Pembangunan Desa (X) berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel Efektivitas Pembangunan Desa (Z_2). Dari hasil pengujian diketahui bahwa Implementasi Pembangunan Desa tidak memberikan pengaruh nyata terhadap Efektivitas Pembangunan Desa.

5 Kesimpulan

Variabel implementasi kebijakan pembangunan desa menunjukkan pada criteria **baik**. Hal ini diperlihatkan oleh rata-rata jawaban responden mengenai implementasi kebijakan pembangunan desa. Proporsi tertinggi implementasi kebijakan pembangunan desa yang menunjang variable tersebut ada pada jawaban responden mengenai: Pengaturan Instruksi mengenai kebijakan pembangunan desa, sedangkan indicator dengan persentase terendah adalah pada jawaban responden mengenai: Partisipasi sasaran kebijakan pembangunan desa, Sosialisasi implementasi kebijakan pembangunan desa, dan Regulasi sasaran implementasi kebijakan pembangunan desa tepat sasaran, Kompetensi pelaksana implementasi kebijakan pembangunan desa.

Variable implementasi kebijakan pembangunan desa, temuan permasalahan yang penting adalah belum penuhnya partisipasi sasaran kebijakan pembangunan desa, dalam hal ini masyarakat, sosialisasi implementasi kebijakan pembangunan desa yang belum menyeluruh, Regulasi sasaran implementasi kebijakan pembangunan desa pada beberapa sisi masih belum tepat sasaran, kompetensi pelaksana implementasi kebijakan pembangunan desa yang belum memadai, kepesertaan dalam pelatihan/training/sosialisasi bagi para pelaksana implementasi kebijakan pembangunan desa yang jarang dilakukan serta masih belum terpenuhinya fasilitas pendukung implementasi kebijakan pembangunan desa.

Permasalahan yang dikemukakan di atas, berimplikasi terhadap kurang efektifnya koordinasi UPTD dimana beberapa unsur yang ada di tingkat pemerintahan desa maupun pada UPTD yang ada di Kecamatan tidak berjalan secara sinergis. Hal ini selanjutnya berdampak pada kurang memadainya upaya peningkatan kinerja pemerintahan desa yang ditandai dengan tidak tersistematisasinya program kerja kepala desa maupun aparatur desa serta tidak terjalinnya komitmen profesionalisme antara pemerintah desa dengan UPTD. Disamping itu, pembangunan desa terhambat sehingga segala sesuatu yang berkenaan dengan pembangunan desa menjadi tidak efektif. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada munculnya beberapa masalah dalam kebijakan pelayanan public oleh pemerintah desa berupa kurang optimalnya laju pembangunan desa serta tersendatnya program kinerja pemerintahan desa yang disebabkan oleh factor koordinasi antara UPTD dengan pemerintah desa yang kurang memadai serta imlementasi kebijakan pembangunan desa yang tidak tersusun secara sistematis.

Referensi

- Agnes, Sawir. 2001. *Analisis Kinerja Keuangan Dan Perencanaan Perusahaan*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Bandung.
- Arief, Suadi. 1995, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Pertama, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2003, *Organisasi Dan Manajemen*, Fakultas Ekonomi Universitas Garut.
- Iskandar, Jusman. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*, Puspanaga, Bandung.
- Iskandar, Jusman. 2005/a, *Dinamika Kelompok Organisasi Dan Komunikasi Sosial*, Puspanaga, Bandung.
- Iskandar, Jusman. 2005/b. *Teori dan Isu Pembangunan*. Puspaga. Bandung
- Iskandar, Jusman. 2005/c. *Kapita Selekta Administrasi Negara*. Puspaga. Bandung.
- Malayu Hasibuan, SP. 2003. *Manajemen Dasar Pengertian Dan Masalah*, cetakan ke delapan, penerbit CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2000 : 67, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*, Cetakan 3, Ghalia, Jakarta.

- Moekijat. 2004. *Koordinasi Suatu Tinjauan Teoritis*, CV. Mandar maju Bandung.
- Nawawi. 2001. *Manajemen Sumberdaya Manusia*, penerbit CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Nigro & Nigro (LAN RI, 1998 : 8), *Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Sistem Administrasi Negara*, LAN RI . Jakarta.
- Sedarmayanti. 2003. *Tata Kerja Dan Produktivitas Kerja*, Penerbit Mandar Maju Bandung.
- Siegel G, Joel dan K Shim. 1999. *Kamus Istilah*, yang dialih bahasa oleh Moch. Kurdi, Cetakan Ketiga, Penerbit Elex Media Komputindo.
- Siagian F. Sondang. 2003. *Organisasi Kepemimpinan Dan Prilaku Administrasi*, Haji Masagung. Jakarta.
- Suadi Arief.1995. *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Pertama, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Suryabrata. 2001. *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suwarno Handyaningrat. 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, Edisi kesepuluh, penerbit PT. Dharma Karya Utama, Jakarta.
- Sugiyono. 2002. *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung
- Umar Husein. 2003. *Metode Penelitian Dan Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Winardi. 2002. *Asas – Asas Manajemen*, CV. Mandar maju Bandung. Woodman, RW, Sawyer,